

BAB III

LATAR BELAKANG PERANG SURIAH SERTA RESPON TURKI

A. Latar Belakang Perang Saudara Suriah

1. Sejarah Singkat Politik Suriah

Suriah adalah salah satu negara Timur Tengah yang letaknya berada berada terpisah di utara semenanjung Arab. Negara ini dihimpit oleh 5 negara. Di timur berbatasan dengan Irak, di selatan berbatasan dengan Yordania, di Barat berbatasan dengan Lebanon dan sedikit berbatasan dengan Israel dan laut Mediterania, dan di utara berbatasan dengan Turki. Secara geografis, 55% wilayah Suriah adalah Gurun yang memiliki cuaca cukup ekstrim terutama di kota kota besar seperti Damaskus dan Aleppo dan membentang hingga ke Yordania.

Di tengah gurun terdapat Sungai Eufrat yang mengalir dari Turki hingga ke Irak. Di selatan, ada dataran tinggi Golan yang berbatasan dengan Yordania dan Israel dan masih berselisih atas klaim perbatasan dengan Israel di wilayah itu. Suriah juga memiliki pegunungan tinggi di pesisir utara yang berbatasan dengan Turki dan membentang ke selatan hingga perbatasan Lebanon. Walaupun begitu wilayah dataran tinggi ini memiliki kepadatan yang tinggi mengingat wilayahnya yang cukup dekat dengan pantai dan Suriah tidak memiliki wilayah pesisir yang luas.

Suriah juga kaya historis, Damaskus sebagai ibukota menjadi kota yang lama didunia yang dimukimi hingga kini, kota ini sudah menjadi bagian dari kerajaan Assyur, Babilonia, hingga Bynzantium. Peradaban Islam juga memiliki pengaruh penting terhadap peradaban Suriah di abad pertengahan dan peradaban

modern. Kota ini menjadi ibu kota Kekhalifahan bani Umayyah pada abad ke 14 hingga menjadi bagian dari Kekhalifahan bani Utsmaniyah yang kekuasaannya dipegang oleh bangsa Turki. Suriah baru menjadi wilayah terpisah dan modern pada saat kekalahan Kekhalifahan Utsmaniyah pada saat perang Dunia Pertama dan menjadi wilayah mandat koloni Perancis melalui perjanjian Sykes-Picot, dan memerdekakan diri dari Perancis pada tahun 1946 setelah perang dunia ke dua.

Setahun setelah awal kemerdekaan Suriah, Timur Tengah memiliki masalah dengan pembentukan negara Israel yang menjerumuskan peperangan antara Israel dan negara-negara Arab dan menyeret Suriah tergabung dalam koalisi negara Arab tersebut. Perang ini membuat Suriah kehilangan wilayah di perbukitan Golan dan memiliki ikatan yang kuat dengan Mesir, hingga pada tahun 1958 kedua negara bersepakat untuk bersatu dalam Republik Uni Arab walaupun hanya bertahan hingga 1961 karena kerusuhan, kudeta dan pemberontakan atas ketidakpuasan masyarakat Suriah atas dominasi Mesir dalam urusan politik dan pemerintahan Uni Arab.

Instabilitas politik Suriah masih terjadi dalam beberapa tahun setelahnya dan puncaknya terjadi pada tahun 1963 saat kelompok Baath mengambil alih pemerintahan melalui kudeta dan peristiwa ini biasa disebut sebagai era revolusi Ba'ath di Suriah. Partai Ba'ath sendiri merupakan partai sekuler dengan ideologi Sosialisme dan Arabisme dengan penekanan "Bangsa Arab" sebagai landasan. Partai pengaruh yang kuat dalam politik di Timur Tengah sejak tahun 1940-an dan 1960 menjadi tahun emas bagi partai Ba'ath yang mana terjadi gejolak revolusi

serupa di Irak sebulan setelah revolusi Ba'ath di Suriah. Partai ini juga yang berperan pada perubahan nama Republik Suriah menjadi Republik Arab Suriah.

Pengaruh partai Ba'ath bertahan lama, namun perpecahan yang terjadi berada didalam tubuh partai itu sendiri antara kelompok sipil dengan kalangan militer. Tepatnya pada tahun 1970, Letnan Jenderal Hafiz al-Assad yang memiliki posisi sebagai menteri pertahanan melakukan penguasaan dengan kudeta damai. Tetapi peresmian Hafiz al-Assad sebagai presiden baru terlaksana pada tahun 1971 setelah menggelar pemilihan umum yang memenangkan dirinya sendiri, walaupun setelahnya ia mengubah sistem pemerintahan Suriah menjadi otoritar.

Selama menjabat, Hafiz al-Assad memiliki karakteristik sebagai pemimpin yang sering melakukan pencitraan dan pemujaan diri secara berlebih dihadapan publik untuk mengontrol stabilitas pemerintahan dan menghindari munculnya musuh yang ingin menggulingkan rezimnya. Karena latarbelakangnya yang berasal dari kalangan militer membuat citra militer juga ikut naik dalam kontestasi politik, beriringan dengan partai Ba'ath yang juga ikut menanamkan sistem pemerintahan dan ekonomi sosialis. Selain itu kelompok Alawiah yang merupakan sebuah sekte dalam Syi'ah juga memiliki lobi politik yang kuat karena Hafiz al-Assad berasal sekte tersebut.

Pendekatan seperti ini tidak secara mutlak membuat musuh rezim berkurang. Sejauh tahun 1980-an, Rezim Hafiz al-Assad menghadapi pertentangan dari Muslim Brotherhood yang berasal menganggapnya rezim penguasa di Suriah yang terlalu sekuler dan juga kuatnya pengaruh Syiah Alawiyah (Nationsonline.org; "*History of Syria*"), sedangkan Suriah sendiri di

dominasi oleh kaum Sunni. Muslim Brotherhood melakukan serangkaian teror yang puncaknya pada peristiwa bom mobil di Damaskus yang mengakibatkan 100 korban meninggal pada 23 Januari 1982.

Presiden Hafiz al-Assad merespon peristiwa tersebut sebagai mulai melakukan kampanye anti teror dengan melarang organisasi Muslim Brotherhood dan memperketat keamanan diseluruh titik negara. Selama melakukan kampanye, ada beberapa rangkaian baku tembak antara militan Muslim Brotherhood dengan tentara Suriah di beberapa titik kota, namun kontak senjata yang paling sengit terjadi di kota Hama pada bulan Februari. Dalam tiga minggu di bulan Februari kota ini dikepung oleh tentara Arab Suriah, kota ini hancur dengan kepanasan asap yang bertebaran di seluruh titik, para tentara banyak melakukan penyisiran dari rumah ke rumah dan korban dari pihak sipil banyak berjatuhan(The Guardian, 2011;” 1982: Syria's President Hafez al-Assad crushes rebellion in Hama”. Peristiwa ini dikenal sebagai Pembantaian Hama 1982 dan berakhir akhir bulan Februari dengan kemenangan dari tentara Arab Suriah.

Hafez al-Assad meninggal pada tahun 2000, dan jabatan presiden digantikan oleh Bashar al-Assad anaknya. Struktur negara tidak berubah saat pemimpin kedua dari dinasti Assad tersebut menjabat, Syiah Alawiyah, Ba'ath dengan sistem sosialisnya, dan pendekatan militer ala rezim masih tetap digunakan. Yang membedakan hanya latar belakang jabatan sebelum presiden, jika seorang Hafiz al-Assad berasal dari kalangan militer sedangkan Bashar al-Assad adalah seorang dokter ahli mata walaupun terpaksa bergabung dalam

militer untuk dipersiapkan mengganti posisi kepresidenan ayahnya setelah kakak tertuanya dibunuh.

Karena latar belakangnya yang militer tersebut, banyak yang berharap kepemimpinan Bashar al-Assad akan jauh lebih terbuka dan tidak menindas rakyat seperti yang dilakukan oleh ayahnya, karena orang mengenal Bashar al-Assad merupakan orang yang rendah hati dan ramah, serta berpendidikan barat yang lebih maju. Pada masa awal jabatannya sebagai presiden, Bashar al-Assad memang melakukan reformasi besar, seperti. Tidak melakukan pemujaan berlebihan seperti yang dilakukan oleh Hafiz al-Assad, memberikan kebebasan berbicara di ruang publik yang telah hilang sejak 1958, dan membebaskan 600 tahanan politik dari kalangan Muslim Brotherhood serta mengajak pulang beberapa pejabat militer senior yang mengasingkan diri di luar negeri karena tidak sepakat atas pengangkatan Bashar al-Assad pemimpin Suriah.

Kebesaran hati Bashar al-Assad hanya bertahan sebentar, justru rezim yang dipimpinnya kembali beringas dengan melakukan banyak ancaman dan tidak segan memenjarakan para aktifis pro reformasi beberapa tahun setelahnya. Penyebabnya, keterbukaan Bashar al-Assad membuat Suriah diisi oleh forum-forum dari kalangan terpelajar yang menuntut transformasi lebih jauh dan demokratis yang dikenal sebagai “Damascus Spring” di tahun yang sama. Pada 2001 era keterbukaan Suriah berakhir, forum-forum diskusi ditutup dan Bashar al-Assad menuduh pengaruh-pengaruh barat menjadi penggerak bermunculannya kaum reformis yang ancaman distabilitas nasional. Dalam hal diplomasi pun sama, dunia melihat adanya peluang kerjasama saat Bashar al-Assad mulai

membuka Suriah, namun pada masa masa setelahnya Suriah mulai melakukan diplomasi yang regresif seperti membiayai para kelompok teror dan terlibat dalam pembunuhan perdana menteri Lebanon, Rafic Hariri pada tahun 2005. Pada tahun 2002 AS juga menuduh Suriah memiliki senjata pemusnah masal dan Presiden Geogre W Bush menganggap Suriah bagian dari “Axis of Evil” (History.com, 2017:”Syria”).

Tertutupnya kembali Suriah membuat pihak yang mengambil bagian dari Damascus Spring tidak berhenti, mereka mengasingkan diri diluar Suriah dan tetap melanjutkan aktifitas diskusi politik, publikasi publikasi mengenai reformasi di Suriah dan tak segan mendirikan partai oposisi Suriah yang berada diluar Suriah itu sendiri seperti Muslim Brotherhood itu sendiri, Uni Sosialis Demokratik Arab, Partai Rakyat Demokratik Suriah, Gerakan Keadilan dan Pembangunan di London (The Washington Post, 2011; “*U.S. secretly backed Syrian opposition groups, cables released by WikiLeaks show*”) yang semuanya berada dalam satu payung koalisi yang dinamakan Deklarasi Damaskus pada tahun 2005 (Carnegie Downment, 2012). Mereka menjadi benih-benih revolusi di luar sana yang menanti pulang untuk melanjutkan perjuangan mereka seperti pada tahun 2000 silam, dan kesempatan tersebut didapat satu dekade setelahnya pada peristiwa Revolusi “*Arab Spring*”.

2. Awal Mula Konflik Saudara Suriah

Perang Suriah atau konflik saudara Suriah merupakan salah satu bagian dari gelombang revolusi musim semi di Timur Tengah atau biasa disebut revolusi

“*Arab Spring*”. Revolusi ini diawali dari Tunisia yang melakukan demonstrasi penurunan presiden setelah peristiwa pembakaran diri seorang tukang sayur bernama “Mohammad Bouazizi” atas dasar perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh aparat. Setelah kejadian mengerikan itu, masyarakat kemudian menuntut pemerintah untuk menegakkan demokratisasi. Setelah Tunisia, efeknya pun dirasakan di Mesir, Libya dan juga ke Suriah. Peristiwa Arab Spring, kalau dikaji dari teori *Domino Hill* (Efek Domino), demokratisasi di Negara-negara Arab memang seperti domino jatuh yang kemudian berimbas kepada baris domino-domino lainnya. Negara-negara di suatu kawasan terkena pengaruh oleh tetangga-tetangganya, begitu pun yang terjadi di Timur Tengah dengan *Arab Spring*-nya.

Untuk konteks Suriah, protes dari masyarakat terhadap elit pemerintah bermula dari desa Deraa, sebuah kota kecil dekat dengan perbatasan Yordania. Waktu itu bermula dari graffiti di dinding sekolah yang dibuat oleh-oleh anak-anak sekolah—*As-Shaab/Yoreed/Eskaat el nizam* (Rakyat ingin menyingkirkan rezim!)—semangat perlawanan terhadap rezim Bashar al-Assad terjadi, pada tanggal 06 Maret 2011. Anak-anak di sekolah tersebut terinspirasi dari Tunisia dan Mesir setelah menonton di televisi. Akibat tindakan nakal anak-anak itu, otoritas pemerintah Suriah kemudian menangkap 15 anak di sekolah itu yang diduga melakukan coretan atau grafiti (Kuncahyono, 2013, hal. 9).

Parahnya, mereka tidak hanya ditangkap dan dikasih wejangan atau peringatan-peringan, akan tetapi kelima belas anak tersebut malah ditahan bahkan juga disiksa layaknya tahanan perang. Hal ini kemudian memancing kemarahan besar keluarga si anak, suku mereka, bahkan masyarakat Suriah secara

keseluruhan. Maka dengan disiksanya anak-anak sekolah itu menjadi pemicu terciptanya gelombang protes besar-besaran di Suriah, yang telah lama memendam kekecewaan terhadap pemerintah, kemudian diakumulasikan dengan fenomena grafiti anak sekolah dan dianiayanya mereka.

Pada tanggal 15 Maret 2011, menggunakan jejaring media sosial untuk mengumpulkan massa, protes yang awalnya hanya membela anak-anak sekolah kemudian menjadi aksi protes atau seruan untuk menjatuhkan rezim Bashar al-Assad. Sehingga ketika massa telah sama-sama menyatakan sikap dan siap demonstrasi, akhirnya pada tanggal 25 Maret 2011, masyarakat Suriah menggelar aksi demonstrasi besar di 7 provinsi dari 14 provinsi yang ada. Eskalasi demonstrasi rakyat yang begitu cepat dan signifikan di berbagai penjuru kota akhirnya memaksa Bashar al-Assad berpidato di depan parlemen pada tanggal 31 Maret 2011 (ABM, 2013, p. 173).

Pada awal Juni 2011, pihak militer Suriah ternyata mulai tidak segan dan takut untuk menembaki demonstran di Kota Hamah, sehingga banyak masyarakat sipil yang meninggal dunia. Dan pada awal Februari 2012, serangan bom dilancarkan militer pro-pemerintah di wilayah Khalidiya, Provinsi Homs. Di waktu hampir bersamaan di daerah lainnya, peluru dan bom-bom juga berkejolak dan banyak sumber mengatakan kalau konflik itu menelan korban jiwa hampir seribu orang meninggal dunia dalam perang yang berlangsung hanya 2 minggu. Kemudian pada Sabtu, 14 Juli 2012 atau pada bulan ke-16 Revolusi jumlah korban telah mencapai 17.000 orang (Kuncahyono, 2013, hal. 19).

Yang lebih ironis dan membikin bulu kuduk berdiri ketika terjadi perang pada hari digelarnya referendum nasional terkait konstitusi baru Suriah. Rezim Bashar al-Assad terus melaukan tindak kekerasan di Homs dan Hamah, hingga menelan korban jiwa ratusan jiwa. Sehingga hingga tanggal 30 Mei 2013, dalam 803 hari revolusim tercatat setidaknya 69.191 korban jiwa, sebagaimana yang dirilis situs *syriansyuhada.com*. Korban akibat konflik berkepanjangan ini terus bertambah seolah tidak solusi untuk meredamkan konflik. Seperti catatan yang dikeluarkan oleh *The Syrian Center for Policy Research* pada tahun 2016, jumlah korban yang meninggal akibat konflik telah mencapai 270.000 orang (Seraamedia, 2018).

Hingga pada Bulan Maret 2018, konflik di Suriah telah berlangsung 7 tahun lamanya. Dan total jumlah korban tewas telah mencapai sebanyak 364.792 orang sejak meletusnya Perang Suriah 2011 lalu. Sebanyak sepertiga dari mereka adalah warga sipil. Korban jiwa naik 13 ribu orang dalam enam bulan terakhir. Berdasarkan keterangan lembaga pengawasan di Inggris, jumlah korban tewas ini termasuk para pejuang, pejabat, dan staf medis (CNN, 2018). Sedangkan pada akhir tahun 2018, menurut laporan *The Syrian Observatory for Human Rights*, jumlah korban tewas akibat perang di Suriah mencapai 560.000 orang. Pembaruan informasi dilakukan ketika Suriah bersiap-siap untuk medan perang baru di barat laut (HAARETZ, 2018).

Ekskalasi pertempuran antara pemerintah dengan pemberontak sangat terasa pada tahun 2012, Pada awal pertengahan, para pemberontak berhasil menguasai sebagian besar wilayah barat laut Suriah dengan wilayah cakupan

separuh dari wilayah kegubernuran Aleppo termasuknya seluruh sisi danau al-Jabbul dan pesisir barat danau Aleppo hingga Idlib. Pertempuran hebat juga terjadi di Damaskus terutama di wilayah pinggiran disaat pasukan pemberontak melancarkan pengepungan Damaskus dalam operasi “*Damascus Vulcano*” sejak 15 Juli hingga 4 Agustus yang dimenangkan oleh pemberontak dengan wilayah penguasaan di selatan Damaskus. (NowLebanon, 2012). Pada akhir 2012 pemberontak juga berhasil merebut wilayah barat sepanjang sungai Eufrat hingga pertempuran di kegubernuran Dir az-Zur yang juga dimenangkan oleh pemberontak.

3. Aktor-Aktor Kelompok Oposisi

Pertengahan 2011 merupakan pintu gerbang menuju kehancuran Suriah, pihak oposisi mulai membentuk diri dalam berbagai kelompok-kelompok anti pemerintah yang kolektif. Jika membicarakan siapa pihak yang berada diantara kelompok pemberontak bersenjata setidaknya ada tiga payung oposisi yang paling banyak memainkan peran oposisi kala itu, ialah Dewan Nasional Suriah (*Syria National Council, SNC*), Badan Koordinasi Nasional (*National Coordination Committee, NCC*), dan Tentara Pembebasan Suriah (*Free Syrian Army*). Dewan Nasional Suriah berasal dari kalangan Muslim Brotherhood maupun kelompok kelompok ciptaan eksil alumni Damascus Spring, kelompok sekuler dan etnis minoritas. Badan ini memiliki posisi sebagai pemerintah tandingan sehingga ini memiliki fungsi sangat diplomatis, yang menurut situs internetnya (Syriacongres.com), kongres terbentuk sebagai respon veto Rusia dan Tiongkok atas rancangan resolusi Suriah yang merugikan Bashar al-Assad oleh Dewan

Keamanan PBB. SNC mengupayakan pengucilan dunia untuk pemerintahan Bashar al-Assad sendiri dengan mengumpulkan jaringan koalisi politik internasional dalam satu program yang dinamakan “*Friends of Syria*”.

SNC terbentuk pada pertengahan 2011 namun piagam Dewan Nasional terbentuk pada Oktober atas inisiatif Burhan Ghalioun setelah melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan kelompok pemberontak di Istanbul (O’Bagy, 2012, hal. 10). Dewan ini beroperasi diluar Suriah dengan markas besar di Istanbul dan juga memiliki kantor cabang di Inggris, Perancis, AS dan Mesir. Serta mendapatkan dukungan penuh dari Arab Saudi, Turki dan Qatar yang turut meberikan bantuan pendanaan.

Pelaksanaan secara operasional SNC dilakukan oleh Pemerintahan Sementara (*Syrian Interim Government, SIG*) yang dibuat sebagai fungsi berstruktur selayaknya pemerintahan negara seperti adanya perdana menteri namun dibuat oleh koalisi pemberontak yang berada dibawah naungan SNC. SIG memiliki presiden, perdana menteri, 7 kementerian dan untuk kementerian pertahanan diambil alih oleh FSA. Pada mulanya SIG memilih kota Gaziantep sebagai markas besar (*Headquarter*) (Loutfi, 2017, hal. 19). Namun berpindah ke kota Azaz di utara Suriah setelah Turki menguasai kota tersebut dalam Operasi Benteng Eufrat (*Euphrate Shield Operation*) (LISTER, 2017).

Fungsi politik SNC tak lain sebagai wadah untuk meluruskan tujuan penggulingan Bashar al-Assad, dengan mewakili seluruh elemen anti Assad yang terdiri dari Muslim Brotherhood yang telah menentang Bashar al-Assad sejak lama, Ideologi Sekuler yang salah satunya merupakan alumni Damaskus Spring,

etnis minoritas yang terdiri dari etnis Kurdi dan Suriah dan Komite Koordinasi Lokal yang menjadi representator daerah diseluruh Suriah. Struktur dewan terdiri dari individu yang menjadi representasi dari kelompok tersebut dan memiliki jumlah kursi yang berbeda-beda antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Lebih jelas ada di tabel berikut

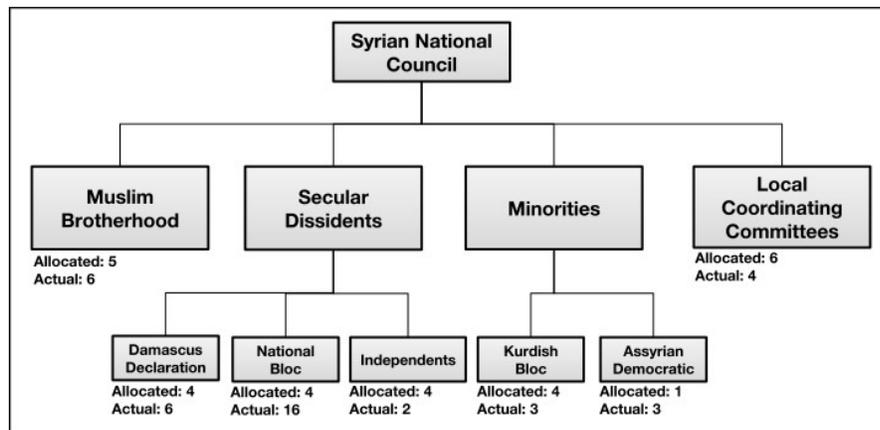


FIGURE 1 | SYRIAN NATIONAL COUNCIL STRUCTURE

(Tabel 3.1 Struktur keanggotaan SNC

Sumber : O, Baghy, Elizabeth ; Syria's Political Opposition, 2012 hal 10)

Selain Badan Nasional Suriah, Kelompok oposisi lainnya juga membentuk Badan Koordinasi Nasional (National Coordination for Democratic Change, NCC). Baik Badan Koordinasi maupun Badan Nasional, sebenarnya memiliki keterikatan walaupun berbeda pandangan dalam melihat konflik. Badan Koordinasi memiliki cara yang moderat dan lebih lunak dengan terus melakukan dialog dengan Bashar al-Assad, serta anti terhadap intervensi asing yang membawa Suriah dalam medan pertempuran (O'Bagy, 2012, hal. 19).

Secara Struktur, NCC lebih membawahi berbagai organisasi berbeda dengan SNC yang membawahi individual sebagai representasi kelompok secara masif. Organisasi yang dibawahinya antara lain adalah Partai Pekerja Revolusioner Arab, Uni Sosialis Arab Demokrat, Partai Komunis Pekerja, Gerakan Arab Sosialis, dan Partai Uni Demokrat (PYD) (National Coordination Body for Democratic Change, 2012). Namun PYD sendiri akhirnya keluar dan kelompok dari etnis kurdi sisanya bergabung dengan Dewan Nasional Kurdistan yang berada dibawah payung SNC.

Pada awalnya SNC dan NCC saling melempar tuduhan satu sama lain, SNC menganggap NCC merupakan kaki tangan rezim karena pendekatan mediasi yang digunakan terlalu lemah, dan Badan Koordinasi juga menyangkal bahwa permintaan untuk menurunkan secara paksa Rezim Bashar al-Assad merupakan suatu hal yang tidak realistis. Walaupun begitu keduanya telah beberapa kali merencanakan penyatuan pada bulan Desember 2011 hingga Januari 2012, dan tetap gagal setelah NCC tidak masuk dalam pertemuan SNC yang diselenggarakan 28 Maret 2012 di Istanbul.

Jika SNC menjadi aktor politik utama Bashar al-Assad, Rezim juga menghadapi militan oposisi terlatih dari Pasukan Pembebasan Suriah (*Free Syrian Army*, atau FSA) yang punya pengaruh besar selama gejolak hingga perang Saudara. Sebuah ironi bahwa FSA terdiri dari mantan anggota Tentara Arab Suriah yang membelot karena Tentara Arab Suriah tidak mampu memperlakukan protestor secara manusiawi. Para tentara dipaksa komandan mereka untuk

membendung pihak sipil yang menuntut mundurnya rezim dengan cara kekerasan yang membuat banyak korban yang berjatuhan.

Satu persatu kelompok terkecil militer pimpinan perwira menengah di kota-kota markas protestor seperti di kota Idlib, Derra dan Homs mulai memberontak. Diawali dari Letkol Hussein Harmoush yang memberikan pernyataan pembelotan di kota Idlib pada 11 Juni bersama dengan 150 anak buahnya berbarngan dengan pembelotan Kolonel AU, Riad al-Assad yang menjadi tokoh deklarasi pembentukan formasi FSA. Hingga bulan Maret ada sekitar 60.000 Pasukan pembelot yang tergabung dalam FSA setelah adanya penggabungan beberapa kelompok pembelot dari berbagai batalion terpisah (Lister, 2016, hal. 5).

FSA juga membangun koordinasi yang kuat dengan SNC pada Desember 2011. Medan operasi pertempuran FSA memang berada di Suriah, tetapi komando kontrol sekaligus markasnya berada di Turki, karena para pembelot mendapatkan bantuan termasuknya pelatihan dan fasilitas dari pemerintah dan militer Turki itu sendiri, sedangkan bantuan persenjataan berasal dari Arab Saudi. FSA benar-benar menjadi peran signifikan dalam tubuh oposisi pada tahun 2012 disaat FSA menggaet beberapa kelompok militan yang lahir dari kalangan sipil seperti Liwa al-Islam, Front Pembebasan Islam Suriah, dan lain sebagainya, dan bertanggungjawab atas konfrontasi peperangan yang menewaskan sedikitnya 1.000 pasukan keamanan Suriah di kota seperti Damaskus dan Aleppo hingga april 2012.

Secara umum para kelompok pemberontak merupakan koalisi gabungan yang semuanya berada dibawah komando sentral FSA. Militan yang tergabung dalam FSA sendiri berada dibawah komando yang bernama Dewan Militer Daerah (*Provincial Military Council*) yang dipimpin oleh Kolonel Qasem Sadeddin, sehingga FSA tidak berdiri sendiri dan setiap wilayah memiliki koalisi yang berbeda. Peran FSA dalam dewan militer tersebut adalah menyalurkan logistik dan strategi terkait operasi yang dilancarkan setiap harinya (*Ibid*, Lister, 2016, hal. 6).

Setidaknya ada sekitar ratusan aliansi oposisi bersenjata yang menaungkan diri kedalam FSA, walaupun dari ratusan tersebut hanya sekitar 6 yang sangat dikenal yaitu, Liwa al-Islam atau Jais al-Islam, Liwa al-Tauhid, Suqor al-Syam, Aliansi Pembebasan Islam Suriah (Syrian Islamic Liberation Front), Jais hal-Fatih dan Ahrar al-Syam. Selain itu pasukan barisan penentang bashar al-Assad yang tak terafiliasi oleh FSA itu sendiri dibagi menjadi dua, pertama dari kalangan islam fundamentalis (Jabhat al-Nusra dan ISIS), dan militan etnis non arab seperti pasukan perlindungan rakyat Kurdi (YPG).

Baik FSA maupun SNC setidaknya telah berhasil menjadikan tahun 2011 hingga Februari 2013 tahun terpenting dalam memformasikan barisan militan dan aliansi politik penentang Bashar al-Assad yang secara intensional mampu menggaet bantuan dari luar Suriah. Keberhasilan wilayah yang dikontrol pemberontak ataupun relasi diplomasi dengan dunia barat. Arab Saudi, Qatar, dan Turki merupakan penyokong pengadaan senjata, pelatihan ataupun pelobi bagi kelompok pemberontak untuk mendapatkan kedaulatan diluar Suriah. Pada

kenyataannya bulan Desember 2011, AS mengakui koalisi oposisi sebagai representatif legal bagi masyarakat Suriah (National Public Radio, 2012), disusul Perancis dan Inggris (Reuters, 2012).

B. KEPENTINGAN TURKI DALAM PERANG SIPIL DI SURIAH

1. Sejarah dan Dinamika Hubungan Turki Suriah

Suriah dan Turki adalah dua negara yang memiliki interaksi yang terbangun berabad-abad lamanya hingga sekarang. Wilayah Turki pernah menjadi satu dengan Suriah disaat masa kejayaan kekhalifahan Islam sekaligus pernah memainkan peranan terkuat secara bergantian. Damaskus pernah menjadi pusat kejayaan Islam di era kekhalifahan Bani Umayyah sedangkan Turki dengan kota-kota seperti Istanbul, Edirne dan Bursa juga pernah menjadi kota penting bagi kekekhalifahan Utsmaniyah atau Kerajaan Ottoman.

Kedua negara ini juga terjebak dalam kebencian historis sejak setelah berakhirnya perang dunia pertama, yang membuat keduanya berpisah secara geopolitik dan menjadi negara modern. Penyebabnya adalah adanya perselisihan perbatasan dan air yang muncul kala itu seperti aneksasi provinsi Hatay dari Suriah dan juga konflik air atas sungai Eufrat dan Tigris atas proyek bendungan (*güneydoğu anadolu projesi*) Turki yang membuat berkurangnya aliran sungai sebanyak 40% ke Suriah pada tahun 1975 (Hammer, 2013).

Semasa perang dingin, kedua negara juga berada dipihak yang berbeda. Semenjak lahirnya Turki modern dibawah kepemimpinan Kemal Ataturk, Turki melakukan revolusi kebudayaan yang Eropasentris dan politik yang sekuler, sehingga ini menjadi modal Turki mendekati diri dengan Eropa secara politik

dan memutuskan menjadi bagian dari NATO di perang dingin. Sebaliknya dengan Suriah yang sejak 1950an telah di dominasi oleh partai Ba'ath dengan idologi sosialisnya, membuat Suriah menjadi bagian dalam poros Timur mendekati Uni Soviet kala itu. Damaskus yang merasa dirugikan atas proyek bendungan, dan perselisihan ideologi membuat pemerintah Suriah dekat dengan PKK, yang pada saat itu sedang bermasalah dengan Turki karena aksi terorisme dan kriminalitasnya.

Menurut laporan dari intelijen Turki saat itu, 80% bantuan dasar persembunyian PKK berasal dari pemerintah Suriah saat perang teluk tahun 1991. Ini mendesak perdana menteri Turki, Hikmet Cetin bertemu dengan Hafiz al-Assad untuk membuat protokol keamanan pada tahun 1992, namun tetap dilanggar oleh Suriah yang pada tahun 1995 tetap memberikan bantuan PKK yang beroperasi di provinsi Hatay yang diklaim oleh Suriah sebagai wilayahnya.

Pada tahun 1996 hubungan keduanya memanas karena Suriah tidak menepati janji untuk mengekstrakdisi Abdullah Ocalan, pemimpin PKK. Ini membuat Turki memutuskan hubungan dengan Suriah dan mengancam akan menganeksasi wilayah utara Suriah serta mengirimkan 10.000 pasukan keperbatasan pada tahun 1998 (Sezgin, 2002, hal. 49). Ancaman tersebut dianggap serius oleh Suriah karena adanya desakan dari Iran dan Mesir yang akhirnya tunduk untuk mengekstrakdisi Abdullah Ocalan dan membuat status PKK menjadi organisasi terlarang dalam perjanjian Adana.

2. Pengembalian Hubungan Turki-Suriah dan Kebijakan “Nol-Masalah”

Turki

Setelah perjanjian Adana, hubungan kedua negara membaik dan atmosfer keduanya semakin positif setelah Bashar al-Assad menjadi pemimpin Suriah dan Partai AKP berkuasa di Turki. Menurut (Alfian, 2018, hal. 130) setidaknya setelah mereka memimpin, Turki dan Suriah mampu menyelesaikan perselisihan Provinsi Hatay secara damai tahun 2005, kesepakatan air memenuhi target pada tahun 2008, dan hubungan dagang kedua negara saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pemutusan damai atas sengketa Provinsi Hatay menjadi awal ketertarikan Turki untuk membangun hubungan damai dengan Suriah, setidaknya Perdana Menteri Erdogan telah membuat Suriah keluar dalam isolasi barat atas pembunuhan PM Lebanon salah satunya dengan menjadi fasilitator dari pertemuan presiden Prancis, Nicolas Sarkozy di Damaskus, 2008 (BBC, 2008).

Hal serupa juga disampaikan Chris Phillips dalam opininya di *The Guardian* (2009), yang menyebutkan setidaknya hubungan termanan Turki membuat suasana dingin di Timur Tengah menjadi lebih kondusif. Setidaknya Suriah menjadi teman baru bagi Turki. Lanjut Turki juga menengahi sengketa wilayah di dataran tinggi Golan antara Suriah dan Israel. Turki Suriah juga mengadakan kesepakatan bebas visa dan perdagangan bebas yang membuat hubungan dagang kedua negara saling menguntungkan. Ekspor Suriah ke Turki 187 juta dollar AS pada tahun 2006 meningkat menjadi 662 juta dollar AS pada 2010, dan sebaliknya, nilai ekspor Turki ke Suriah dari 662 juta Dollar AS menjadi 1,85 milyar dollar AS pada tahun yang sama (Alfian, 2018, hal. 30).

Ketertarikan Turki untuk berdamai dengan Suriah merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri nol masalah dengan tetangga (*Zero Problem With Neighbor*) yang diajukan oleh Ahmet Davutoglu, seorang akademisi yang akhirnya ditunjuk menjadi politisi partai AKP. Davutoglu memasukan prinsip nol masalah dalam proposalnya, bernama *Strategic Depth* yang pembahasannya berupa strategi Turki yang sangat potensial sebagai pusat kekuatan karena secara geografis berada di antara Timur Tengah, Balkan, Kaukasus, Asia Tengah Mediterania, dan Laut Hitam (Grigoriadis, 2010, hal. 4).

Menurut Davutoglu, setidaknya Turki hingga saat ini mampu menikmati keberadaan identitas transregional. Turki telah dianggap jembatan bagi wilayah regional tersebut terutama antara dunia barat dengan dunia islam. Sehingga mampu memainkan peran besar dalam lingkungan regional melalui kebijakan diplomasi proaktif yang damai dan bebas masalah dengan negara tetangga serta memanfaatkan instrumen diplomasi lunak dalam ambisinya menjadi kekuatan sentral.

Ini bisa menjadi jawaban mengapa Turki berusaha berdamai dengan Suriah, begitupun dengan Irak. Semenjak nol masalah digunakan, terjadi peningkatan yang signifikan, setelah sempat menjadi musuh bagi Turki di perang Teluk. Turki mengadakan kerjasama pertahanan dengan Pemerintah Regional Kurdistan (PRK) di Irak dalam pemberantasan teroris PKK. Sebenarnya ini merupakan sebuah lonjakan dimana pemerintah KRG merupakan pihak yang paling getol mengadvokasi orang Kurdi atas hegemoni politik bangsa Turki yang

membuat bangsa Kurdi tersingkirkan di negaranya. Turki juga membuat beberapa persetujuan dagang dan membuka kantor konsulat di Ebril, ibuokta PRK.

Kebijakan nol masalah sesungguhnya menjadi produk politik AKP dalam merombak doktrin politik secara domestik yang telah ada dan dibangun sejak awal beridirinya Republik Turki dalam kepemimpinan Mustafa Kemal Attaturk. Turki dikenal sebagai negara Sekuler sejak berdiri, simbolis agama dalam nafas kehidupan dihapuskan secara mutlak, dan segala aspek dibuat lebih mendekat kepada Eropa baik secara budaya maupun pemerintahan. Namun semenjak partai AKP yang berhaluan politik islam sayap kanan berkuasa, nafas islam kembali dihelakan dalam ruang publik, Masjid yang menggunakan bahasa Turki di kembalikan dalam bahasa Arab, dan secara diplomatis *Strategic Depth* setidaknya juga membuat citra Turki menjadi ramah bagi negara tetangganya di Timur Tengah.

Selain sekuler, militarisme di Turki juga kuat. Integrasi militer dan pemerintah tidak dapat dipisahkan. Militer setidaknya berperan kuat dalam negara, setidaknya Turki telah enam kali mengalami kudeta militer setelah karena para pemimpin negara tidak sekharismatik Mustafa Kemal. Pendekatan militer juga masuk dalam politik luar negerinya. Selain lebih condong kebarat, pendekatan yang digunakan dalam politik luar negerinya cenderung lebih keras dan menekan terutama kepada negara di Timur Tengah ataupun negara tetangga. Sebagai catatan, Turki sejauh ini pernah melakukan invansi terhadap Siprus, wilayah Hatay milik Suriah, hingga tidak pernah mengakui genosida Armenia yang pernah dilakukan pada perang dunia pertama.

Dalam hal ini, partai AKP berusaha untuk membalikan kekuatan militer yang cukup liar dalam mengontrol pemerintah terutama paska kudeta militer pada Tahun 2016.

3. Sikap Turki dalam Revolusi Suriah 2011

Doktrin ini juga tidak dapat menghindari kritik dan sesuatu hal yang tidak realistis. Turki yang selama ini berambisi menjadi aktor perdamaian di timur tengah dianggap cukup pilih pilih, pada kenyataannya ada beberapa masalah perdamaian dan konflik yang belum bisa dituntaskan seperti Yunani atas konflik teritorialnya di Siprus dan di laut Aegea, ataupun sulitnya mengakui pembantaian yang terjadi di Armenia. Menurut (Askerov, 2017), setidaknya doktrin nol masalah hanya menjadi sebuah simbolik dalam rencana kebijakan jangka panjang. Karena secara jangka pendek, Turki harus membuat perhitungan rasional atas permasalahan yang dihadapi saat ini.

Lambat laun kebijakan nol masalah semakin menunjukkan sebuah bias dan keraguan pada saat dihadapkan oleh revolusi Suriah bersama beberapa negara Arab lainnya yang masuk dalam gelombang revolusi *Arab Spring*. Pada Maret sebenarnya Erdogan dua kali mencoba menghubungi Bashar al-Assad untuk membicarakan janji-janji reformasi sosial dan ekonomi secepatnya terkait demonstrasi yang menyebar diseluruh Suriah dengan pendekatan yang positif (Erdogan urges Assad to hasten reform, 2011). Ketegasan Turki terhadap Bashar terjadi pada bulan Juni Erdogan menganggap Bashar telah melakukan kekejaman dan mendesak untuk memecat pejabat keamanan yang bertindak brutal (Turkey tells Bashar al-Assad to cease Syria repression, 2011).

Bashar al Assad juga memutuskan hubungan dengan Turki sementara pada bulan Maret dan menarik diplomat dua hari setelahnya karena situasi Damaskus tidak aman. Turki benar benar memutuskan hubungan dengan Suriah dan mengusir diplomat Suriah dari Ankara pada bulan Mei setelah tentara melakukan pembantaian di kota Houla yang membuat lebih dari 100 jiwa warga sipil menjadi korban. Peristiwa ini membuat Turki bergabung kedalam koalisi barat dan bersama sama mengusir pejabat tinggi dan diplomat Suriah di Turki, AS, Inggris, Australia dan Perancis pada 29 Mei.

Presiden Erdogan berpendapat jika Turki tidak bisa tinggal diam melihat kekejaman rezim dalam pembantaian Houla. Dilansir Reuters (Syrian diplomats expelled over Houla killings, 2012), “dunia tidak bisa terus bersabar atas berbagai pembantaian menyedihkan, setidaknya ada 100 laki-laki, perempuan yang menjadi korban dalam pembantaian ini”. Erdogan juga mengatakan dalam pertemuan internal partai AKP “Seharusnya dewan keamanan PBB bertindak tegas untuk mengirimkan tim observer ke Suriah untuk menghentikan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi”.

Tekanan Erdogan ke dewan keamanan menumbuhkan hasil. Setidaknya sebulan setelah kejadian, dewan keamanan membuat pertemuan di Jenewa (*Geneva I*) pertama kali untuk menyusun basis pembicaraan damai (*Basis Peace Talk*) untuk yang dikenal sebagai *Geneva Communiqué*, setelah enam poin *Peace Plan* pada bulan Maret mendapatkan veto penolakan oleh Rusia dan Tiongkok.

Walaupun Suriah sendiri telah menyepakati, *Road Map Geneva 1* tidak benar benar di implementasikan, karena tidak memuat rencana secara spesifik

untuk menurunkan Bashar al-Assad (Syria conference fails to specify plan for Assad, 2012) ataupun gejatan senjata. Hillary Clinton yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Negara AS juga mengatakan bahwa pembicaraan ini hanya “Perubahan Minor secara Tekstual”, yang berarti tidak ada perubahan yang berarti.

Kenyataannya pertempuran tetap berlanjut, hingga pada 19 Juli pasukan pemberontak FSA berhasil menguasai 4 penyebrangan perbatasan Suriah dan Turki (Free Syrian Army seizes control of 4 border crossings with Turkey, Iraq, 2012) dan membuat *Border checkpoint* Turki ditutup pada 25 Juli (Turkey to close all border gates with Syria, 2012). Para pengungsi yang kabur dan pertempuran terjadi begitu intensif antara Juli hingga Agustus, bahkan pada 7 Agustus ada sekitar 13.000 pengungsi mencoba menyeberang ke Turki termasuk jenderal yang membelot.

Pada 4 Oktober juga terjadi ketegangan di perbatasan saat Suriah meluncurkan bom mortar ke arah Turki hingga menewaskan 5 warga Turki di kota perbatasan Akacale. Serangan yang menewaskan dua perempuan dan tiga anak tersebut membuat gempar parlemen. Menurut BBC (Turki kembali menembaki perbatasan Suriah, 2012) setidaknya peristiwa ini membuat parlemen menyetujui menggelar operasi militer di perbatasan. Media berbahasa Turki *Radikal.com.tr* juga memberitakan serangan balasan oleh pasukan Turki, sebelum keputusan pengamanan diperbatasan di kerahkan oleh parlemen disahkan. Setidaknya artileri yang berjarak tembak 8 hingga 25 KM di lepaskan ke titik titik mortar di wilayah Suriah. 5 Jet F-16 juga dikerahkan untuk mengantisipasi serangan-serangan rudal.

DK PBB juga mengancam tindakan Suriah tersebut, karena akan berdampak besar terhadap stabilitas di wilayah kawasan. Peristiwa tersebut juga sekaligus menjadi babak baru bagi Turki dalam konflik Suriah dalam melakukan gertakan fisik secara langsung. Jika dihadapkan kembali pada babak sebelumnya, (Walker J. W., 2012, hal. 5-6) menjelaskan setidaknya Turki memiliki dua fase skenario kebijakan politik dalam mengintervensi Suriah. Intervensi pertama terbatas yang mengacu pada pembuatan *Buffer Zone* sebagai akses pengungsi untuk masuk ke wilayah Turki. Dan yang kedua adalah babak yang telah dibahas di paragraf sebelumnya yang mana Turki melakukan perencanaan intervensi secara fisik.

Namun secara gamang, sejak skenario pertama muncul indikasi bahwa Turki telah memiliki hubungan dengan FSA yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Indikasi tersebut muncul atas permintaan Turki terhadap FSA untuk membantu pembentukan zona tersebut dengan alasan kemanusiaan. Turki tidak sertamerta melakukan dukungan penuh terhadap FSA secara terang terangan bahkan hingga pada skenario kedua sekalipun, melainkan menunggu kesempatan jika Liga Arab dan NATO bersepakat mendukung.

4. Bantuan Turki Terhadap Oposisi Bersenjata

Sebelum membicarakan indikasi bantuan Turki terhadap pemberontak. Perlu diketahui bahwa Dewan Nasional Suriah dan Tentara Pembebasan Suriah dibentuk dan berkantor pusat di Turki. Alasannya adalah Turki adalah tempat yang relatif stabil dan aman secara politik dibandingkan negara disekitar Suriah lainnya. Pada skenario pertama, intervensi terbatas Turki lebih berdasar pada kebijakan

kemanusiaan (*Humanitarian Intervension*) dan ini menjadi alasan Turki menerapkan kebijakan Open Border terhadap pengungsi.

Turki menjadi daya tarik para pengungsi untuk datang, selain dari posisi geografi Turki yang berdekatan dengan Eropa. Turki juga memiliki badan pemerintahan “The Turkish Disaster and Emergency Management” atau AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı). AFAD memiliki fungsi untuk manajemen bantuan bencana dan isu humaniter. Badan inilah yang berpengaruh dalam memberi bantuan terhadap para pengungsi, ditambah juga adanya koordinasi dari kementerian luar negeri yang mengambil tanggung jawab penuh terhadap para pengungsi. (Bidinger)

Secara bersamaan, selain pengungsi para tentara yang membelot juga ikut kabur ke Turki. Setidaknya ada ratusan para mantan tentara dengan berbagai pangkat yang memilih untuk tidak menodongkan senjata kepada para demonstran dengan keluar atau kabur dari Suriah. Beberapa dari mereka yang terkenal adalah Letkol Riad al-Assad, penggagas pembentukan FSA dan menjadi komandan bersama tujuh perwira pembelot lainnya. Mereka mendirikan FSA di kamp pengungsian Turki dan mengumumkan ke publik lewat video di internet (Asharaq Al-Awsat, 2011).

Hubungan Turki dengan tentara pembelot tersebut hanya bagian dari urusan perlindungan humaniter saja, selainnya pengungsi lain. Walaupun Letkol Riad dan puluhan komandan militer lainnya memiliki tempat khusus di kamp pengungsian yang dinamakan “*Officers Camp*”. Pemerintah Turki, khususnya

Kementerian Luar Negeri menyangkal memberi dukungan politik dan persenjataan terhadap pembelot ataupun oposisi. Setidaknya jebir menlu Turki mengatakan bahwa Turki tidak memandang mereka sebagai kalangan yang datang dengan tujuan khusus, mereka datang dari Suriah karena perang dan diberi fasilitas tinggal sementara (Stack, 2011).

(Balci, 2012) mengatakan hubungan Turki dengan pemberontak bersenjata tidak begitu jelas. Turki tidak ingin dipandangan terkait dengan masalah masalah Suriah. Setidaknya menurut The New York Times (The New York Times, 2013), pemberontak FSA hingga 2013 banyak mendapatkan dana bantuan dari negara-negara Arab mayoritas Sunni dan CIA. Tugas Turki hanya memberikan fasilitas penyelundupan persenjataan yang masuk ke Suriah untuk pemberontak-pemberontak.

Jebir FSA, dalam pertempuran mematikan di Aleppo yang menewaskan 2.000 pada pertengahan 2012 pun membantah telah menerima bersenjata kendali udara dari Turki dalam berbagai pertempuran awal. Pada kenyataannya Turki lebih memilih untuk menggunakan misil udara dan persenjataannya sendiri, guna menyerang tentara Suriah pada saat terjadi ketegangan di perbatasan pada September 2012 atas bantuan NATO.

Namun BBC pernah mewawancarai Thawaiba Kanafani (Syria crisis: Turkey training rebels, says FSA fighter, 2012), seorang wanita kalangan sipil yang bergabung dengan FSA di Provinsi Adana, Turki. Ia mengatakan militer Turki memainkan peran penting untuk melatih sipil yang ingin bergabung tetapi

tidak memiliki latarbelakang militer. Para cadet tersebut dilatih secara profesional dan keras di kamp militer tersembunyi. Ia juga menyangkal adanya keterlibatan Qatar dan Arab Saudi dalam pelatihan tersebut, walaupun pelatihan tersebut murni berasal dari program pelatihan khusus dari militer Turki.

Kerahasiaan Turki dalam membantu oposisi berakhir pada november 2014, pada saat Turki secara terang terangan akan melatih FSA dibantu AS. AS dan Turki bersepakat untuk membantu oposisi setelah wapres AS, Joe Biden mengunjungi Turki pada bulan tersebut (DefenseNews, 2014). Joe Biden mengatakan koalisi AS akan melanjutkan pembicaraan tentang Suriah secara produktif, sedangkan pejabat Turki juga mengatakan dalam pembicaraan ini akan menghasilkan sebuah hasil kesepakatan yang tegas. Kedua negara membagi tugas, AS menyuplai persenjataan sedangkan pasukan khusus Turki akan melatih 2.000 pasukan oposisi moderat dan bertempat di kota Kirsehir.

Kedua negara tersebut berselisih arah terhadap persetujuan yang dibuat tersebut. Menurut majalah daring *Defense News (Ibid)*, AS lebih memfokuskan pada ancaman ISIS sebagai tinjauan yang lebih genting sebagai ancaman baru dalam konflik. AS menjatuhkan harapan pada bantuan kepada pasukan Kurdi YPG sebagai kunci pertempuran ISIS. Sedangkan Turki tetap menaruh tujuan lama untuk menyalurkan kepentingan terhadap para pemberontak FSA dengan tujuan yang sama untuk menjatuhkan Bashar al-Assad. Walaupun pada tahun tersebut pasukan kurdi YPG telah mendapatkan tempat, Turki justru lebih memilih pasukan Peshmerga dari Irak yang juga ikut berperang bersama kelompok oposisi. Setidaknya pada 21 November Perdana Menteri Turki, Ahmed

Davutoglu mengunjungi tempat pelatihan militer Peshmerga di distrik Zakho, Irak Utara.